

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN
2026



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:
Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2026.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya Renja ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige, 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

Drs. SALOMO. H.K. SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1. Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah	
3.2. Program dan Kegiatan P-Renja Perangkat Daerah.....	

BAB IV PENUTUP..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renja Perangkat daerah menjadi rancangan akhir renja perangkat daerah yang bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Toba.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029. Visi Bupati/ Wakil Bupati Toba periode 2025–2029 adalah **“Toba Mantap 2029”** dan untuk dapat mewujudkan Misi

ke-3, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, yaitu:

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah”, adalah suatu misi pembangunan ekonomi yang berfokus pada:

Aspek Utama

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
2. Potensi Daerah: Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keunggulan kompetitif daerah untuk meningkatkan ekonomi.
3. Kemandirian Daerah: Meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi sendiri, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Strategi

1. Mengidentifikasi Potensi Daerah: Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keunggulan kompetitif daerah.
2. Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat daerah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi.

4. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Mengembangkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Manfaat:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pengurangan Kemiskinan: Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di daerah.
3. Peningkatan Kemandirian Daerah: Meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi sendiri.

Tantangan

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah.
2. Infrastruktur yang Belum Memadai: Infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat: Ketergantungan pada pemerintah pusat dapat mengurangi kemandirian daerah.

Dengan demikian, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah memerlukan strategi yang tepat dan komprehensif untuk mengatasi tantangan dan mencapai manfaat yang diharapkan.

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian ikut dalam mewujudkan perekonomian yang baik di Kabupaten Toba melalui peningkatan sarana prasarana dan pengamanan perdagangan,

meningkatkan Pertumbuhan Industri, serta Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing untuk menjadi pelaku ekonomi yang lebih baik lagi, Kabupaten Toba bisa menjadi daerah tempat wisata yang maju dan terdepan dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing terhadap perekonomian daerah yang inklusif dimana dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja dan peluang tumbuhnya investasi dan sektor-sektor usaha ekonomi baru.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan, yang sasarannya untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTP;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
32. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9).

35. Peraturan Bupati Toba Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
37. Peraturan Bupati Toba Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.
38. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 272 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Toba Samosir;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2026 adalah sebagai acuan kerja dan memberikan arah, landasan yang kuat dan jelas serta sebagai alat kendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam satu tahun anggaran.

Tujuan Penyusunan Renja adalah untuk menciptakan Sinkronisasi, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah setiap tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Kabupaten Toba.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu terdiri dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2026), pencapaian Renstra 2021 s/d 2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang mengacu kepada renstra Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA TW II	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	11,25%	BPS	-
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	19,82%	BPS	-

Sumber Data : BPS

- Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan target 11,25% sedangkan realisasi kinerja belum terpublikasi, dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Sektor Terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman atau produksi produk para pelaku usaha. Sektor industrial adalah apa yang dikenal sebagai sektor sekunder, karena produk dan jasa yang ditawarkan sektor ini digunakan atau diproses pada bisnis lain, perhitungan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba pada Tahun 2025.

- Sedangkan target kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2025 dengan target 19,82% sedangkan realisasi belum terpublikasi, perhitungan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba pada Tahun 2025, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal.

Adapun perhitungan rincian sebagai berikut :

$$\begin{array}{lcl} \text{Kontribusi Sektor} & & \text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor} \\ \text{Perdagangan terhadap} & = & \frac{\text{Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% \\ \text{PDRB} & & \end{array}$$

*Catatan : **** Adapun hasil perhitungan persentase Kontribusi Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB di atas bersumber dari data “Kabupaten Toba dalam Angka 2026, 2026” BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Toba.*

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Program

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba pada tahun 2025 terhadap analisis pencapaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala untuk tiap-tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kesempatan Kerja
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Pertumbuhan Industri
6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Baik dan Efektif

Adapun uraian capaian target Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi**

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pelatihan dan Fasilitasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA tw II	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Persentase Koperasi/UMKM Yang di bina dan difasilitasi	6,67%	0	0
	- Persentase pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56%	1,92%	188.57%
	- Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten	11,21%	0	0

Sumber Data : Bidang Koperasi dan UKM

- Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi pelaksanaan kinerjanya terlaksana dengan baik di tahun 2025 tw II dengan target kinerja 6,67% realisasi kinerja 0% (data terlampir) sehingga persentase pencapaian 0% dengan uraian sebagai berikut :

Persentase koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\% \\
 &\quad + \frac{\text{Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah UMKM seluruhnya}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Adapun kegiatan tahun 2025 tw II untuk pembinaan kepada koperasi/UMKM sekaligus pemberian fasilitasi belum dilaksanakan.

- Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dengan target kinerja 12,56% dengan realisasi kinerja tw II 1,92% (**Lampiran**) sehingga persentase pencapaian kinerja 15,29%, dengan uraian sebagai berikut :

Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= (1/52 \times 100) = 1,92\%$$

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi” adalah:

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.449.000,- dengan realisasi tw II sebesar Rp. 9.344.000,- (23,10%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Memiliki 1 sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja **30** unit usaha, realisasi kinerja **1** unit usaha, dan memiliki Rp. 40.449.000,- dengan realisasi tw II sebesar Rp. 9.344.000,- (23,10%)

Hambatan/masalah:

- Secara umum koperasi yang binaan kabupaten Toba banyak yang tidak aktif
- Beberapa koperasi yang dikategorikan aktif (Aktif Kelembagaan, usaha dan keuangan) tidak melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT)

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan koperasi.
- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten target kinerja 11,21% dengan realisasi tw II 0%.

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$$

= 0%

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten” adalah:

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Tidak memiliki kegiatan dan sub kegiatan untuk TA 2025.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Meningkatnya Kesempatan Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA TW II	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,06%	BPS	147,09%
	- Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	6,38%	0%	0 %

Sumber Data : Bidang Koperasi dan UKM

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 target kinerja 2,06%, dengan realisasi kinerja tw II 0%, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat} & \\ \text{Pengangguran} & \\ \text{Terbuka (TPT)} & = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\% \\ & = 0\% \end{aligned}$$

Adapun realisasi tersebut di atas bersumber dari data *Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba*, kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya indikator tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM dan IKM, membuka lapangan kerja, meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri dan memberikan penyuluhan ke masyarakat sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka semakin berkurang.

- Indikator Kinerja Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dengan target 6,38% realisasi kinerja tw II 0% (**Lampiran**), dengan uraian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Meningkatnya Usaha Kecil} & \\ \text{yang Menjadi Wirausaha} & = \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Usaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\% \\ & = 0\% \end{aligned}$$

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha” adalah:

1. Program Pengembangan UMKM

Memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 225.138.360,- realisasi tw II Rp. 8.036.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan target kinerja **50** unit usaha, realisasi kinerja **89** unit usaha dan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 225.138.360,- realisasi tw II Rp. 8.036.000,- capaian 3,57%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan dana/anggaran untuk fasilitasi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha
2. Kegiatan dilakukan pada triwulan IV.

Hambatan/masalah:

- Pendanaan pelaku UMKM yang kurang

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku UMKM yang membutuhkan fasilitasi untuk pengembangan usaha

Terlepas dari bantuan pemerintah untuk membantu meningkatkan usaha kecil, ada banyak alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan dan cara yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk mendorong usahanya agar lebih berkembang. Salah satunya adalah dengan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan pelaku bisnis dan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha yaitu memilih jenis usaha yang sesuai, melakukan riset pasar, penganggaran modal dengan tepat, memilih lokasi usaha yang tepat, memanfaatkan peralatan yang sudah ada, memanfaatkan social media sebagai

sarana dan kanal promosi, inovasi produk yang mengikuti jaman, totalitas dalam bisnis.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA TW II	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	20,83%	0 %	0 %
	- Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	33,38%	4,53%	13,57%
	- Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,77%	2,83%	2,92%
	- Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	29,15%	3,37%	11,55%
	- Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan di tingkat Regional dan Tingkat Nasional	7 Jenis	7 Jenis	100%

Sumber Data : Bidang Perdagangan

- Indikator Kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal” target kinerja 20,83% dengan realisasi kinerja tw II 0 % tidak dapat terealisasi, disebabkan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba tidak ada alokasi dana untuk membentuk dan membina kelompok pedagang/usaha informal yang ada.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat” adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 437.170.947,- realisasi tw II Rp. 85.257.000,- (19,50%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan target kinerja **25** unit, realisasi kinerja **25** unit, dan memiliki pagu anggaran Rp. 437.170.947,- realisasi tw II Rp. 85.257.000,-capaian 19,50%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pencapaian kinerja adalah:

1. Dana Tugas Pembantuan tidak ada dari Pemerintah Pusat

Hambatan/masalah:

- Tidak ada anggaran/dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dari pusat (Pembangunan sarana dan prasarana tidak merupakan program prioritas nasional).
- Sebagian anggaran terserap oleh belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp. 306.000.000,- dengan persentase 69,99%.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kembali dengan Pemerintah Pusat, sehingga dana/anggaran dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten Toba.
- Indikator Kinerja “Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)” dengan target kinerja 33,38%,

realisasi kinerja tw II 4,53% (data terlampir), persentase pencapaian kinerja 13,57% , dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang

$$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha di wilayah kabupaten}} \times 100$$

$$= (352/7770 \times 100) = 4,53\%$$

Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan di tahun 2025 tw II sebanyak 352 pelaku usaha (**Lampiran 5**), pemohon (pelaku usaha) sudah dapat mengurus izin usahanya secara mandiri melalui Aplikasi OSS (Online Single System) yang terhubung langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin dan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap izin usahanya sudah mulai tinggi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)” adalah:

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Memiliki 1 Kegiatan yaitu Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 5.147.800,- realisasi tw II Rp. 0,- (0%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang target kinerja **50** unit usaha realisasi kinerja **20** unit usaha, dan memiliki pagu anggaran Rp. 5.147.800,- realisasi tw II Rp. 0,- capaian 0%.

Hambatan/masalah:

- Masih perlu sosialisasi agar pemahaman dan tingkat kepedulian masyarakat/pelaku usaha tentang kepengurusan izin Tanda Daftar Gudang
- Sebagian besar gudang yang digunakan para pelaku usaha adalah disewa.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha berupa Tim Sosialisasi dan Penertiban dengan Bappenda selaku Koordinator Pajak dan Retribusi Daerah, Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang memiliki gudang.
- Indikator Kinerja “*Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*” target 96,77% realisasi tw II 2,83% (**Lampiran**), dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Stabilitas dan Jumlah} &= \frac{\text{Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu}}{\text{Rata – rata Harga Kebutuhan Pokok}} \times 100\% \\ \text{Ketersediaan Harga Barang} & \\ \text{Kebutuhan} & \\ &= (842,3725/29756 \times 100) = 2,83\% \end{aligned}$$

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “*Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*” adalah:

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Memiliki 3 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 84.555.700,- dengan realisasi tw II sebesar Rp. 28.663.800,- (33,90%) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Monitoring Pendistribusian LPG 3 Kg dan Makanan yang sudah Kadaluarsa), dengan target Kinerja 2 laporan dan realisasi kinerja 1 laporan yaitu capaian kinerja 50% dan memiliki pagu anggaran Rp. 12.645.800,-, realisasi tw II Rp. 4.241.000,- capaian 33,54%.
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Pemantauan Harga Bahan Pokok), mencakup monitoring harga bahan pokok terhadap 45 komoditi (**Lampiran 8**) dilakukan di Pasar Balige, Pasar Laguboti dan Pasar Porsea, dengan target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 6 laporan yaitu capaian kinerja 50%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 25.149.800,- , realisasi tw II Rp. 7.009.000,- dengan capaian 27,87%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak alam 1 (satu) Kabupaten/Kota (**Lampiran**) dilakukan di Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Porsea, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Habinsaran, dengan target kinerja 1 laporan,

realisasi kinerja 1 laporan, dan memiliki pagu anggaran Rp. 31.574.300,- realisasi tw II Rp. 17.413.800,- dengan capaian 55,15%.

c. Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Monitoring Pendistribusian Pupuk Bersubsidi), dengan target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 15.185.800,-, realisasi tw II Rp. 0,- dengan capaian 0%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan pelaku usaha memberikan data berupa harga jual komoditas yang *uptodate*,
2. Terbinanya komunikasi serta pendekatan petugas pendata terhadap pelaku usaha yang baik dan sehat
3. Monitoring harga bahan pokok ini dilaporkan setiap hari sebelum pukul 11.00 Wib melalui aplikasi SiHarapanku yang terintegrasi langsung dengan aplikasi SiHarapanku yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan aplikasi SP2KP yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Hambatan/masalah:

- Kurangnya petugas pendata di Pasar Balige, Pasar Laguboti dan Pasar Porsea,
- Kemampuan sumber daya manusia petugas penginput data aplikasi SiHarapanku dan SP2KP harus ditingkatkan/dilatih

- Sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2 (dua) atau 4 (empat) tidak ada dalam pengumpulan data 45 komoditi di Kec Balige, Laguboti dan Porsea

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan petugas pendata
 - Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap petugas pendata dan penginput data aplikasi Siharapanku dan SP2KP diadakan dan dievaluasi secara berkala
 - Terasilitasinya kendaraan roda 2 petugas pendata untuk pengumpulan data.
- Indikator Kinerja “*Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku*” target 29,15% realisasi tw II 3,37% (**Lampiran**) pencapaian kinerja 11,55% dengan predikat **Kurang**, dengan rincian sebagai berikut :

Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

$$= \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

$$= (27/802 \times 100) = 3,37\%$$

Adapun yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan tera dan tera ulang pada pelaku usaha yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) agar tercipta tertib ukur dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku” adalah:

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Memiliki 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.570.300,-, realisasi tw II Rp. 2.575.000,- (10,92%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang target kinerja 250 unit, realisasi kinerja 244 Unit, yaitu capaian kinerja 97,60%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 23.570.300,-, realisasi tw II Rp. 2.575.000,- dan capaian 10,92%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Pelaksanaan tera ulang oleh Petugas Tera dari Bidang Perdagangan terhadap timbangan pelaku usaha secara rutin dan berkala khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan, sehingga tertib ukur dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha

Hambatan/masalah:

- Petugas tera yang ada di Bidang Perdagangan masih sangat kurang dibandingkan dengan potensi tera yang ada di Kabupaten Toba

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan, Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Petugas Tera
- Penambahan anggaran untuk penyampaian informasi (sosialisai) kepada pelaku usaha/pemilik UTTP pentingnya tera dan tera ulang
- Menciptakan Pasar Tertib Ukur (PTU)

- Indikator Kinerja “*Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional*” dengan target 7 jenis realisasi 7 jenis sehingga persentase pencapaian 100%, produk lokal yang dapat dipromosikan di tingkat regional dan tingkat Nasional dimana kegiatan ini meliputi promosi produk unggulan daerah yang diikuti Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, yaitu mengikuti pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah produk lokal yang dapat dipromosikan di tingkat Regional dan tingkat Nasional” adalah:

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 979.679.920,-, realisasi tw II Rp. 110.555.223 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan target kinerja 7 jenis UMKM, realisasi kinerja 7 UMKM yaitu capaian kinerja 100%, dan memiliki pagu anggaran Rp. 979.679.920,-, realisasi tw II Rp. 110.555.223, dengan capaian 11,28%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang baik
2. Partisipasi dalam pameran dan Event F1H20. Adapun produk unggulan daerah yang dipamerkan adalah produk kerajinan hasil dari tenun, Kacang, kopi, Jagung, Padi dan Sarung (7 jenis).

Hambatan/masalah:

- Kurangnya pendanaan dalam produksi umkm, tidak adanya mentor dalam kualitas dan inovasi produk UMKM.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk keikutsertaan dan ketersediaan produk dan peserta UMKM
- Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap administrasi keuangan dan standarisasi serta inovasi produk UMKM
- Diharapkan kedepannya kegiatan *event* ataupun pameran untuk promosi produk unggulan daerah Kabupaten Toba semakin banyak mengikuti/berpartisipasi sehingga produk UMKM semakin dikenal di Tingkat Nasional.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Pembinaan IKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pelatihan dan Fasilitasi

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Meningkatnya Pembinaan IKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pelatihan dan Fasilitasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Persentase IKM yang Dibina dan Difasilitasi	2,62%	1,53%	42,62 %
	- Pertumbuhan Industri	7,19%	1,56%	21,70 %

Sumber Data : Bidang Perindustrian dan ESDM

- Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi dengan target kinerja 3,59%, realisasi kinerja tw II 1,53%, sehingga persentase kinerja 42,62% dengan rincian sebagai berikut :

Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi $= \frac{\text{Jumlah IKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah IKM seluruhnya}} \times 100\%$

$$= (25/1627 \times 100) = 1,53\%$$

- Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri dengan target 7,19% realisasi tw II 1,56% dengan persentase pencapaian 21,70% dengan rincian sebagai berikut :

Pertumbuhan Industri $= \frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{Jumlah industri tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah industri sd tahun } n} \times 100\%$

$$= ((1627-1602)/1602 \times 100) = 1,56\%$$

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Pertumbuhan Industri” adalah:

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Memiliki 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 151.102.566,-, realisasi tw II Rp. 8.036.000,- (5,32%) dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Memiliki 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, dan memiliki anggaran Rp. 151.102.566,-, realisasi tw II Rp. 8.036.000,- , capaian 5,32%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

Ketersediaan dana/anggaran

Hambatan/masalah:

- Terbatasnya modal kerja peserta pelatihan dan pelaku industri kecil dan menengah
- Tidak ada/belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi
- Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk pembangunan industri
- Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap administrasi keuangan dan standarisasi serta inovasi produk IKM
- mewujudkan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Toba, perlu diatur mengenai arah pengembangan industri yang akan terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Industri

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	63,16%	30,55%	48,37%
	- Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	71,43%	42,85%	59,99%
	- Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %

Sumber : Data Bidang Perindustrian & ESDM

- Indikator kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin” dengan target kinerja 63,16%, realisasi kinerja tw II 30,55% sehingga persentase pencapaian yaitu 48,37% (data terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin = $\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$

$$= (11/36) \times 100 = 30,55\%$$

Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait = $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$

$$= (15/35) \times 100 = 42,85\%$$

Target kinerja “Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait” yaitu 71,43% sedangkan realisasi kinerja tw II 42,85% sehingga persentase pencapaian kinerja 59,99%.

Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk membayar pajak. Instansi terkait yang mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) tersebut adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba. Dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak **119** dan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sebanyak **99**.

“Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait” adalah:

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan tidak ditampilkan.

- Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini lewat aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan melaksanakan kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, Perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, serta penyebarluasan data/atau informasi data, yang mana aplikasi yang punya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan dilaporkan per semester sehingga ada 2 dokumen laporan tahunan.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Penambahan dana/anggaran untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota

2.1.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025.

Pembangunan di bidang Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian dan pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 7.631.833.743,-** (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dengan realisasi **Rp. 2.020.276.123,-** (*Dua Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yaitu realisasi sebesar 26,47% sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 Triwulan II (tabel berikut),

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
BULA: per 30 Juni

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			s/d bin ini (Rp.)	%	
1	2	4	19	20	21
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	14.955.000	3.295.000	22,03	11.660.000
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.335.000	12.154.000	41,43	17.181.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.163.212.408	1.186.897.311	28,51	2.976.315.097
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.352.450	5.559.000	12,26	39.793.450
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.087.240	1.849.000	30,38	4.238.240
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.500.343	23.745.500	52,19	21.754.843
3	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	11.578.188	5.780.150	49,92	5.798.038
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.549.971	21.860.800	56,71	16.689.171
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	8.800.000	44,00	11.200.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.882.500	54.498.600	49,60	55.383.900
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	128.000.250	43.680.091	34,13	84.320.159
2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	866.928.000	350.150.000	40,39	516.778.000
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.010.000	21.625.648	19,66	88.384.352
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.905.600	18.155.000	36,38	31.750.600
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
VII	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	40.449.000	9.344.000	23,10	31.105.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
VIII	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	30.830.000	3.335.000	10,82	27.495.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
IX	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta D	225.138.360	8.036.000	3,57	217.102.360
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
X	Penertiban Tanda Daftar Gudang				
	Fasilitasi Penertiban Tanda Daftar Gudang	5.147.800	-	0,00	5.147.800
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
XI	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	437.170.947	85.257.000	19,50	351.913.947
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			s/d bln ini	%	
			(Rp.)		
1	2	4	19	20	21
XII	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12.645.800	4.241.000	33,54	8.404.800
XIII	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	25.149.800	7.009.000	27,87	18.140.800
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	31.574.300	17.413.800	55,15	14.160.500
XIV	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15.185.800	-	0,00	15.185.800
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
XV	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	23.570.300	2.575.000	10,92	20.995.300
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
XVI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	979.679.920	110.555.223	11,28	869.124.697
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
XVII	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	151.102.566	8.036.000	5,32	143.066.566
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
XVIII	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupate/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	14.892.200	6.424.000	43,14	8.468.200
	Jumlah	7.631.833.743	2.020.276.123	26,47	5.611.557.620

LAPORAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DARI SISI CAPAIAN ATAS TARGET REALISASI
KEUANGAN DAN FISIK KABUPATEN TOBA UNTUK TA. 2025 (Per-Bulan)

Bulan : per 18 Juli 2025

Nama Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana			Jumlah Anggaran Keuangan (Non Fisik) (Rp.)	Jumlah Anggaran Untuk Fisik (Rp.)	Target					Capaian					Capaian Keu. Fisik (Rp.)	%
		APBN (Rp.)	APBD (Rp.)	DAK (Rp.)			Rencana Penarikan Dana per Bulan sesuai DPA (Rp.)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (Rp.)	%	Realisasi Dana per Bulan (SP2D) (Rp.)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Toba	7.631.833.743	-	7.631.833.743	-	7.631.833.743	45.532.283	1.167.269.596	1.167.269.596	100	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Total Anggaran	7.631.833.743	-	7.631.833.743	-	7.631.833.743	45.532.283	1.167.269.596	1.167.269.596	100	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO H.K SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196806011989031004

[illegible]

**TARGET DAN CAPAIAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA. 2025**

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Bulan : per 18 Juli 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Target		Capaian		Keterangan
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	2.020.748.672					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADA)	2.020.748.672	136.342.286	6,75	229.234.550	168,13	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-					
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-					
5	BELANJA	8.797.131.163					
5.1	BELANJA OPERASI	8.771.828.713	1.167.269.596	13,31	-	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	25.302.450	-				
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-					
5.4	BELANJA TRANFER	-					
TOTAL BELANJA		8.797.131.163	1.167.269.596	13,31	-	0,00	

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO H.K SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196806011989031004

2.1.2. Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2025 s/d 2029 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terbagi menjadi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang membawa gambaran sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar:

A.1 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. UMKM yang memperoleh bantuan fasilitasi berupa peralatan
2. UMKM yang dilatih pada pelatihan kewirausahaan
3. Mengikuti Pameran pelaksanaannya dalam daerah, baik didalam Provinsi maupun luar Provinsi
4. Pelaksanaan RAT setiap tahunnya pada koperasi yang aktif
5. Koperasi yang mendapat pembinaan dan bantuan peralatan

B. Urusan Pilihan :

B.1. Perdagangan

1. Pasar Rakyat yang direhabilitasi dari dana DAK yaitu Revitalisasi Pasar Inpres Balige.
2. Ter-update data harga bahan kebutuhan pokok 40 Komoditi di 3 Pasar yaitu Balige, Laguboti dan Porsea di Kabupaten Toba pada SIHARAPANKU.
3. Jumlah peredaran barang kadaluarsa meningkat.
4. Melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) Peredaran bahan makanan dan makanan olahan di 3 (tiga) pasar yaitu Pasar Balige, Pasar Laguboti dan Pasar Porsea sebanyak 6 kali sidak.

B.2. Perindustrian

1. Industri Kecil Menengah yang dilatih sekaligus mendapat bantuan peralatan
2. Sentra industri yang dibangun sebanyak 1 sentra.
3. IKM yang dibina dan difasilitasi

4. Pembangunan Pagar keliling pada Sentra Industri yang ada di Desa Sigaol Kecamatan Uluan

C. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang :

C.1. Keuangan

1. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021, Target sebesar Rp. 1.649.035.000,- Realisasi Rp. 1.428.671.625,- dengan Persentase 86,64%.
2. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022, Target sebesar Rp. 1.319.228.000,- Realisasi Rp. 1.353.591.115,- dengan Persentase 102,60%.
3. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023, Target sebesar Rp. 1.618.585.00,- Realisasi Rp. 1.595.082.865,- dengan Persentase 98,54%.
4. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, Target sebesar Rp. 2.127.370.672,- Realisasi Rp. 1.724.808.080,- dengan Persentase 81,01%.
5. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, Target sebesar Rp. 2.020.748.672,- Realisasi Triwulan II Rp. 614.253.900,- dengan Persentase 30,40%.

Adapun capaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (tahun lalu) Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T-C.29 (terlampir).

Tabel TC-29
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025
Kabupaten Toba

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada akhir periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024						Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7) x 100%		10		11=(6+8+10)		12=(11/5) x 100%	
		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	12,56	685.000.000	-	-	12,56	120.000.000	7,85	43.035.000	62,5	35,86	12,56	105.000.000	20,41	148.035.000	16.255,11	21,61
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	Unit	42	685.000.000	-	-	25	120.000.000	25	43.035.000	100	35,86	7	105.000.000	32,00	148.035.000	76,19	21,61
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	13,45	1.115.000.000	-	-	8,97	100.000.000	6,73	511.037.800	75,0	511,04	8,97	315.000.000	15,70	826.037.800	116,73	74,08
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	Orang	330	1.115.000.000	-	-	40	100.000.000	40	511.037.800	100	511,04	80	315.000.000	120,00	826.037.800	36,36	74,08
2.17.06	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	35,87	1.532.500.000	-	-	5,61	260.000.000	2,24	-	39,9287	0,00	5,61	105.000.000	7,85	105.000.000	21,88	6,85
2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	1.532.500.000	-	-	3	260.000.000	0	-	0	0,00	2	105.000.000	2,00	105.000.000	4,00	6,85
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	15,97	3.279.059.000	-	-	1,80	441.000.000	0,00	-	0	0,00	1,80	618.050.000	1,80	618.050.000	11,27	18,85
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	7014	3.279.059.000	-	-	232	441.000.000	0	-	0	0,00	500	618.050.000	500,00	618.050.000	7,13	18,85

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada akhir periode		Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7) x 100%		10		11=(6+8+10)		12=(11/5) x 100%	
		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,63	2.797.500.000	-	-	5,87	617.500.000	5,87	393.450.645	100,0	63,72	6,12	580.000.000	11,99	973.450.645	180,84	34,80
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	512	2.797.500.000	-	-	22	617.500.000	22	393.450.645	100,0	63,72	23	580.000.000	45,00	973.450.645	8,79	34,80
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	31,43%	34,77	510.058.382	-	-	31,99	75.000.000	16,69	23.811.046	52,2	31,75	32,68	80.516.382	49,37	104.327.428	141,99	20,45
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang	470	510.058.382	-	-	40	75.000.000	40	23.811.046	100	31,75	50	80.516.382	90,00	104.327.428	19,15	20,45
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	%	100	8.811.250.000	-	-	12,50	1.210.000.000	18,75	333.552.022	150	27,57	12,50	1.498.750.000	31,25	1.832.302.022	31,25	20,80
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar	15	8.811.250.000	-	-	2	1.210.000.000	1	333.552.022	50	27,57	3	1.498.750.000	4,00	1.832.302.022	26,67	20,80
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	96,77	4.587.371.000	-	-	98,41	892.500.000	91,03	142.158.920	92,5	15,93	96,78	916.625.000	187,81	1.058.783.920	194,08	23,08
3.30.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	Pelaku Usaha	800	571.012.000	-	-	70	105.000.000	0	-	0	0,00	150	110.250.000	150,00	110.250.000	18,75	19,31
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar	14	3.726.853.000	-	-	2	735.000.000	2	93.535.040	100	12,73	2	751.250.000	4,00	844.785.040	28,57	22,67
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	Pelaku Usaha	70	289.506.000	-	-	10	52.500.000	10	48.623.880	100	92,62	1	55.125.000	11,00	103.748.880	15,71	35,84

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada akhir periode		Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=(8/7) x 100%		10		11=(6+8+10)		12=(11/5) x 100%	
		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	43,72	5.317.856.000	-	-	8,74	1.294.550.000	4,37	144.504.153	50,0	11,16	96,78	1.102.075.000	101,15	1.246.579.153	231,36	23,44
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Unit	3331	5.317.856.000	-	-	300	1.294.550.000	300	144.504.153	100	11,16	150	1.102.075.000	450,00	1.246.579.153	13,51	23,44
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	Jenis	7	3.595.562.000	-	-	6	625.000.000	6	85.602.254	100	13,70	6	661.250.000	12,00	746.852.254	171,43	20,77
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Jenis	7	3.595.562.000	-	-	7	625.000.000	7	85.602.254	100	13,70	7	661.250.000	14,00	746.852.254	200,00	20,77
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	7,27	17.769.728.112	-	-	6,71	3.561.770.112	6,76	2.790.838.168	100,7	78,36	6,85	3.887.358.000	13,61	6.678.196.168	187,21	37,58
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	3	17.769.728.112	-	-	3	3.561.770.112	3	2.790.838.168	100	78,36	3	3.887.358.000	6,00	6.678.196.168	200,00	37,58
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	3.548.108.702	-	-	50,00	806.500.000	70,43	102.550.300	140,9	12,72	56,00	633.048.351	126,43	735.598.651	126,43	20,73
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	Izin	113	3.548.108.702	-	-	3	806.500.000	2	102.550.300	66,7	12,72	14	633.048.351	16,00	735.598.651	14,16	20,73
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	12	2.627.500.000	-	-	2	500.000.000	2	27.595.000	100	5,52	2	500.000.000	4,00	527.595.000	33,33	20,08
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi industri	Dokumen	4	2.627.500.000	-	-	4	500.000.000	4	27.595.000	100	5,52	4	500.000.000	8,00	527.595.000	200,00	20,08
02.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	32.994.878.235	-	-	100	6.423.038.154	36,11	4.901.739.289	36,11	76,31	100	6.314.827.080	136,11	11.216.566.369	136,11	33,99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada akhir periode		Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7) x 100%		10		11=(6+8+10)		12=(11/5) x 100%	
		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	447.809.000	-	-	100	84.000.000	50,00	60.341.000	50	71,83	100	88.200.000	150,00	148.541.000	150,00	33,17
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	37	17.763.412.500	-	-	100	3.565.000.000	100	3.005.037.550	100	84,29	100	3.588.250.000	200,00	6.593.287.550	540,54	37,12
2.17.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	25	40.000.000	-	-	100	70.000.000	0	-	0	0,00	100	-	100,00	-	400,00	-
2.17.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	285.506.000	-	-	100	52.500.000	100	22.421.000	100	42,71	100	55.125.000	200,00	77.546.000	200,00	27,16
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	77,78	541.250.000	-	-	100	200.000.000	0	-	0	0,00	100	110.250.000	100,00	110.250.000	128,57	20,37
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%	100	4.381.276.622	-	-	100	882.700.000	100	622.874.546	100	70,56	100	763.108.000	200,00	1.385.982.546	200,00	31,63
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	%	100	2.954.208.000	-	-	100	253.588.000	0	-	0	0,00	100	442.880.000	100,00	442.880.000	100,00	14,99
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	5.067.056.000	-	-	100	1.002.750.000	100	1.035.869.786	100	103,30	100	1.010.637.000	200,00	2.046.506.786	200,00	40,39
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%	100	1.554.360.113	-	-	100	312.500.154	100	155.195.407	100	49,66	100	256.377.080	200,00	411.572.487	200,00	26,48
					89.311.371.431				16.926.858.266		9.499.874.597				#####		26.817.374.410		

DISUSUN
KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO HK. SIMANJUNTAK
PEMBINA TINGKAT. I
NIP. 19680601 198903 1 004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral dan pasar. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang akan dituangkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pratama tinggi/eselon II.b;
- b. Sekretariat, jabatan administrator/eselon III.a terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi, jabatan pengawas/eselon IV.a;

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- d. Bidang Perdagangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 1. Seksi Kemetrologian, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- e. Bidang Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Sandang, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Industri Pangan, Agro, Hasil Hutan, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- f. Bidang Pasar Rakyat, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Verifikasi, Pengawasan dan Penertiban Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dengan mengacu pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta sasaran RPJMD, maka Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- d. Pembinaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam secara berkala;
- e. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi Berprestasi/Terbaik pada berbagai tingkatan;
- f. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir ;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Terknis dan Manajemen bagi Koperasi dan UMKM;
- h. Mengikutsertakan Koperasi dan UMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi;

- i. Pengembangan Pola-Pola Kemitraan;
- j. Penyediaan informasi teknologi, pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Sumber Daya Manusia;
- k. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Klaster;
- l. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- m. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pelayanan Perijinan Usaha untuk TDP dan SIUP dengan waktu proses masing-masing 5 hari kerja;
- n. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Industri, Perdagangan dan Gudang;
- o. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha Koperasi dan UMKM;
- p. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis;
- q. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap bulan;
- r. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan;

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam menjalankan fungsi pelayanannya adalah:

1. Keterbatasan dalam infrastruktur sehingga menghambat perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas dan kreatifitas dalam mengelola SDM.

3. Akses dan tingkat penerapan teknologi untuk menggerakkan sektor rill masih rendah.
4. Kondisi permintaan barang dan jasa berkualitas oleh sektor rumah tangga dan sektor-sektor lainnya terus meningkat, sementara daerah belum mampu memenuhinya.
5. Produk yang dihasilkan oleh daerah belum stabil dan berkelanjutan (*sustainable*).
6. Daya saing daerah dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa ke daerah lain masih lemah.
7. Jiwa kewirausahaan masyarakat belum berkembang.
8. Pengelolaan SDA di berbagai sektor masih sangat minim.
9. Distribusi pendapatan penduduk belum merata, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
10. Lemahnya organisasi pengusaha untuk menggalang potensi pengusaha yang ada.
11. Belum tersedianya sarana maupun prasarana pembangunan sentra-sentra industri.

Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM serta IKM;
- e. Kurangnya koordinasi untuk membubarkan Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM serta IKM;

- h. Kesadaran pelaku Koperasi dan UMKM serta IKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
- i. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah;
- l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
- n. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD dapat dilihat dari tabel SWOT berikut :

Analisis Lingkungan Internal A. <i>Faktor-faktor Kekuatan :</i> - Visi dan Misi yang jelas; - Tersedianya Peraturan Perundang-undangan; - Jumlah Koperasi, UMKM yang terus berkembang; - Kewenangan Otonomi Daerah;	Analisis Lingkungan Eksternal A. <i>Faktor-faktor Peluang :</i> - Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah; - Tersedianya potensi usaha; - Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan; - Pangsa pasar yang semakin terbuka dengan diberlakukannya MEA; Terbukanya lapangan kerja.
B. <i>Faktor-faktor Kelemahan :</i> - Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/sudah ada; - Sarana/prasarana yang kurang memadai; - Dana operasional yang terbatas; - Profesionalisme SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal; - Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan; - Penerapan Teknologi Industri yang masih sederhana; - Keterbatasan penguasaan pasar.	B. <i>Faktor-faktor Tantangan :</i> - Mewujudkan Koperasi dan UKM yang aktif, sehat dan berdaya saing - Meningkatkan Perekonomian sektor Riil serta pengembangan skala usaha Koperasi dan UKM - Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor industri - Meningkatkan Daya Saing Industri Unggulan - Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam negeri - Peningkatan Kualitas Perlindungan Konsumen - Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Perdagangan

Formulasi Isu-isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025.

Rumusan Perubahan Internal :

- Meningkatkan kemampuan dan disiplin personil/pelaksana;
- Optimalisasi dan rasionalisasi penggunaan anggaran;
- Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Rumusan Perubahan Eksternal :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba;
- b. Melakukan fasilitasi permodalan dalam bentuk peralatan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi, UMKM dan IKM secara optimal;
- c. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi, UMKM dan IKM;
- d. Menerapkan teknologi industri tepat guna dalam peningkatan daya saing produk;
- e. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasif kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Toba, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 (terdiri dari 8 Program, 14 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan, yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPd Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Cakupan Kinerja penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.639.296.950	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Cakupan Kinerja penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.169.114.214	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	44.290.000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	63.959.750	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	14.955.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	34.624.750	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	29.335.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	29.335.000	
	<i>Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	4.163.212.408	<i>Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.671.699.672	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	38	4.163.212.408	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	38	3671699672	
	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	45.352.450	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	45.352.450	
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	45.352.450	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	45.352.450	
	<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi kepegawaian	13,89%	-	<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi kepegawaian	13,89%	-	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan	17	-	- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan	17	-	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	-	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	-	
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	231.598.242	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	295.268.492	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	6.087.240	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	6.087.240	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	45.500.343	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	45.500.343	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	28	11.578.188	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	28	11.578.188	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik yang Disediakan	52	-	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	52	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	38.549.971	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	42.989.971	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPd Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	109.882.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	169.112.750	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	3	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	3	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	994.928.250	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	904.928.250	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	128.000.250	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	128.000.250	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	866.928.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	776.928.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	159.915.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	187.905.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	110.010.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	138.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102	49.905.600	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102	49.905.600	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	-	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56%	40.449.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56%	40.449.000	
	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>		Jumlah Koperasi	14	40.449.000	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>		Jumlah Koperasi	14	40.449.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	0	-	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	0	-	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota		Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	52	40.449.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota		Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	52	40.449.000	
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Toba	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	13,45%	-	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Toba	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	13,45%	-	
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	60	-	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	60	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60	-	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60	-	
4	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	6,73%	-	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	6,73%	32.500.000	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Koperasi yang berkualitas	5	-	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Koperasi yang berkualitas	5	32.500.000	
	sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha koperasi yang difasilitasi kemitraan koperasinya	30	-	sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha koperasi yang difasilitasi kemitraan koperasinya	30	32.500.000	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Toba	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	30.830.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Toba	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	30.830.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang diberdayakan	900	30.830.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang diberdayakan	900	30.830.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	30.830.000	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	30.830.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan usaha Mikro	30	-	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan usaha Mikro	30	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12	-	
6	Program Pengembangan UMKM	Kabupaten Toba	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	6,63%	225.138.360	Program Pengembangan UMKM	Kabupaten Toba	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	6,63%	289.024.860	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		Jumlah Wirausaha Baru	25	225.138.360	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		Jumlah Wirausaha Baru	25	289.024.860	
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25	225.138.360	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25	289.024.860	
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kabupaten Toba	Pertumbuhan Industri	7,19%	151.102.566	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kabupaten Toba	Pertumbuhan Industri	7,19%	217.713.456	
	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	3	151.102.566	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	3	217.713.456	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	151.102.566	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	217.713.456	
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	71,43%	-	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	71,43%	-	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri		Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	25	-	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri		Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	25	-	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	29	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	29	-	
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kabupaten Toba	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2	14.892.200	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kabupaten Toba	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2	14.892.200	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Informasi industri	4	14.892.200	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Informasi industri	4	14.892.200	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	14.892.200	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	14.892.200	
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kabupaten Toba	Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	34,08%	5.147.800	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kabupaten Toba	Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	34,08%	5.147.800	
	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>		Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	100	5.147.800	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>		Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	100	5.147.800	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	5.147.800	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	5.147.800	
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Toba	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	25,00%	437.170.947	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Toba	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	25,00%	541.863.312	
	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	3	437.170.947	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	3	541.863.312	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	437.170.947	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	541.863.312	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabupaten Toba	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,77%	84.555.700	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabupaten Toba	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,77%	234.035.450	
	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	150	12.645.800	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	150	12.645.800	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	12.645.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	12.645.800	
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	3	56.724.100	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	3	178.183.850	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1	25.149.800	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1	97.396.550	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	3	31.574.300	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	3	80.787.300	
	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	15	15.185.800	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	15	43.205.800	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	15	15.185.800	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	15	43.205.800	
13	Program Standadisasi dan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Toba	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	29,15%	23.570.300	Program Standadisasi dan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Toba	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	29,15%	167.962.130	
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	900	23.570.300	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	900	167.962.130	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500	23.570.300	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500	167.962.130	

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2		- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2		
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kabupaten Toba	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	7	979.679.920	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kabupaten Toba	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	7	568.500.420	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	7	979.679.920	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	7	568.500.420	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7	979.679.920	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7	568.500.420	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1		- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	-	
			J u m l a h		7.631.833.743			J u m l a h		7.312.032.842	

KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004

Tabel T-C.31
Review Terhadap P- RKPD Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tata Cara Penampungan Aspirasi melalui Musrenbang dalam rangka pelaksanaan penampungan aspirasi, dibentuk kelompok yang terdiri dari perwakilan dari desa. Kelompok satu membahas bidang sarana dan prasarana fisik, Kelompok Dua membahas bidang perekonomian, Kelompok Tiga membahas bidang sosial dan budaya. Hasil pembahasan setiap kelompok akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Tim di tingkat Kecamatan dan Berita Acara tersebut akan dibawa ke tingkat Kabupaten untuk pembahasan selanjutnya di tingkat Propinsi dan Pusat.

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba memiliki Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengembangan UMKM, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan ada 2 (dua) yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang terdiri dari Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang terdiri dari Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Aspirasi Masyarakat peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Kelompok Ekonomi menyampaikan beberapa usulan/saran yang dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Toba sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
274	2277500	10-02-2025	Haposan Hasibuan	Bantuan Benang Tenun	24 kg	Sigaol Timur, Kab. Toba	Kab. Toba	Uluan	Sigaol Timur	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
292	2278316	10-02-2025	Janri Simanjuntak	Bantuan Benang Tenun	keterbatasan bahan baku benang tenun dikelompok tenun mandir di desa meat sehingga produksi berkurang	dusun 3, Kab. Toba	Kab. Toba	Tampahan	Meat	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
322	2280467	10-02-2025	Ramli Siregar	Bantuan Benang Tenun	250 kilo	Siregar Aek Nalas, Kab. Toba	Kab. Toba	Uluan	Siregar Aek Nalas	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
323	2280534	10-02-2025	Ronny Siagian	Bantuan Benang Tenun	Kurang mampu mengikuti persaingan pasar karena Ekonomi lemah untuk Modal dalam pengadaan bahan benang	Kelompok tenun Ulos Satahi Saoloan Dusun III, Kab. Toba	Kab. Toba	Sigumpar	Banua Huta	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
403	2284556	10-02-2025	Hotman P.Butarbutar	Bantuan Benang Tenun	240	Dusun I, II, III, Kab. Toba	Kab. Toba	Uluan	Sigaol Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
513	2300682	11-02-2025	Rosdiana Tambunan	Bantuan Benang Tenun	untuk pemakaian para pekerja tenun	Balige I, Kab. Toba	Kab. Toba	Balige	Balige I	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
540	2305319	11-02-2025	Marlon Sauri Napitupulu	Bantuan Benang Tenun	Kurangnya modal pengadaan tenun. Dibutuhkan sebanyak 190 Kg	Desa Parsambilan, Kab. Toba	Kab. Toba	Silaen	Parsambilan	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
586	2307324	11-02-2025	Efendi Silaen	Bantuan Benang Tenun	Bantuan benang tenun sebanyak 150 Kanting	Desa Lumban Dolok, Kab. Toba	Kab. Toba	Silaen	Lumban Dolok	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
655	2319375	12-02-2025	Ebeneser Panjaitan	Bantuan Benang Tenun	Pengadaan bantuan benang tenun sebanyak 6.000 kanting	Desa Hutnamora, Kab. Toba	Kab. Toba	Silaen	Hutnamora	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
687	2328096	12-02-2025	Dingin Sitorus	Bantuan Benang Tenun	Alat Tenun 42 Set	Dusun IV Panamean, Kab. Toba	Kab. Toba	Uluan	Sampuara	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
735	2348469	14-02-2025	Efendi Panjaitan	Bantuan Benang Tenun	Pengadaan benang Ulos 750 kanting	Desa Pintu Batu, Kab. Toba	Kab. Toba	Silaen	Pintu Batu	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
765	2358135	14-02-2025	Indra P. Barimbing	Bantuan Benang Tenun	kendala modal untuk pengadaan benang bahan tenun	Desa Maju, Kab. Toba	Kab. Toba	Sigumpar	Maju	Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba tahun 2026, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perubahan rencana kerja tahun 2026 sebagai dokumen untuk penyusunan rencana kerja pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, pagu indikatif, dan prakiraan maju.

Berbagai bentuk kinerja yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025–2029 yang akan ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini merupakan dokumen untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Toba tahun 2026.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian disesuaikan dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba. Tujuan, Sasaran strategis, Program, Indikator kinerja, dan Target kinerja tahun 2026 yang seharusnya dicapai

sesuai dengan RPJMD dan Rencana Strategis Kabupaten Toba periode tahun 2026 adalah seperti pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Program Kinerja Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
Meningkatnya Kualitas Koperasi, usaha mikro, nilai tambah perdagangan dan daya saing industri		Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	14,39
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	19,39
		Rasio PDRB Industri	11,57
		Persentase koperasi yang berkualitas (%)	23,38
	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	23,38
	Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	14,39
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	19,39
	Meningkatnya daya saing industri	Rasio PDRB Industri	11,57

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Adapun langkah-langkah untuk mencapai tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah:

1. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM koperasi, fasilitasi kemitraan koperasi dan keanggotaannya, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, dan fasilitasi akses permodalan koperasi
2. Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha mikro, pendampingan perizinan usaha mikro, perizinan usaha mikro, pelatihan SDM

usaha mikro, dan pemberian bantuan peralatan dan bahan bagi usaha mikro.

3. Terlaksananya pengawasan barang bersubsidi, promosi produk unggulan daerah, identifikasi harga kebutuhan pokok dan barang penting, pengujian (tera/tera ulang) alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan, serta tersedianya sarana dan prasarana perdagangan.
4. Terlaksananya pengawasan usaha yang memiliki izin industri, fasilitasi standarisasi dan legalitas industri kecil menengah.

Berdasarkan peraturan Bupati Toba nomor 24 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bupati Toba nomor 74 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Toba tahun 2021-2026, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dengan target kinerja tahun 2026 berdasarkan rancangan akhir renstra tahun 2025-2029.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
2.	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	%	14,39
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	19,39
4.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,57
5.	Persentase koperasi yang berkualitas	%	23,38

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang tertuang dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	%	56
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	41
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,57
III	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	81,50
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	6
3	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	14,67
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	66,45
5	Persentase koperasi yang berkualitas	%	23,38
6	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	%	14,39

3.2 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi telah dirumuskan dan ditetapkan visi dan misi Kabupaten Toba untuk jangka menengah periode 2025-2029. Dengan ditetapkannya visi tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan serta isu strategis yang

harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk mencapai sasaran dan target dari program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan rencana kerja ini dibutuhkan dana/anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Program/Kegiatan yang tertuang pada perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian didanai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun 2026.

Perubahan rencana kerja yang disusun untuk tahun anggaran 2026 ini terdiri dari 15 (lima belas) program dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah di Kabupaten Toba, semua kecamatan, dan semua kelurahan/desa. Kebutuhan pagu indikatif yang direncanakan untuk direalisasikan sebesar Rp. 5.331.329.000,-, dan untuk prakiraan maju tahun 2027 sebesar Rp 7.633.457.925,-.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 diusulkan pendanaannya dari dana APBD seperti dana transfer umum, dana alokasi umum dan sumber pendanaan lainnya yang dianggap sah. Untuk lebih rinci perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sesuai yang telah direncanakan dan hasil analisis kebutuhan serta telah di-input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						5.331.329.000,00							7.633.457.925,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.091.274.890,00							7.260.403.815,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.091.274.890,00							7.260.403.815,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.848.804.890,00						-	7.129.604.815,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	89.50	72.00	79.50	81.50	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem- bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh- an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem- bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh- an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.194.317.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	4.230.272.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	4.194.317.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		4.230.272.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.160.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	23.160.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	23.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		23.160.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	246.690.302,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	237.690.302,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	5.031.630,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		5.031.630,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	40.000.182,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		40.000.182,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	-	-	-	-	-	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	89.50	72.00	79.50	81.50	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	53.124.600,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		53.124.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem- bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh- an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	128.533.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem- bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh- an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		119.533.890,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	1.260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.001.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-	-	1.078.001.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	128.001.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		128.001.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				47 Laporan	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	141.636.588,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-	-	269.481.513,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	121.011.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		121.011.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	-	-	-	-	-	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		[Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	89.50	72.00	79.50	81.50	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	20.625.588,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		20.625.588,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	-	-	-	-	-	4.848.804.890,00	-	-	-	-	-	-	7.129.604.815,00	-
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		73.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		44.344.925,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	undefined	-			undefined undefined	20.000.000,00						-	2.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas koperasi]	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	61	49	51	41	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi	-			6 Unit	20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				300 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	0,00						-	2.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	36.650.000,00						-	36.650.000,00	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	100	10.17	10.17	25.42	36.650.000,00	-	-	-	-	-	-	36.650.000,00	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	36.650.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	36.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	36.650.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba		36.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	0,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas koperasi]	Persentase koperasi yang berkualitas	30.16	26.92	28.80	23.38	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	undefined	-			undefined undefined	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0 Unit Usaha	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Masyarakat Kabupaten Toba		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	130.000.000,00						-	18.000.000,00	
		[Meningkatkan kapasitas usaha mikro]	-	-	-	-	-	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	130.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-	-	18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				0 Unit Usaha	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0 Unit Usaha	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				30 Orang	120.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				100 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	55.820.000,00						-	72.149.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas Usaha mikro]	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	16.34	13.81	13.91	14.39	55.820.000,00	-	-	-	-	-	-	72.149.000,00	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	55.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	72.149.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Masyarakat Kabupaten Toba		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Masyarakat Kabupaten Toba		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				12 UMKM	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	7.060.710,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Masyarakat Kabupaten Toba		7.060.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	JUMLAH							5.331.329.000,00							7.633.457.925,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, dan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2026.

Balige, 2025

Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

Drs. SALOMO. H.K. SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

INSPEKTORAT

Jln. Huta Bulu – Mejan, Balige, Sumatera Utara 22312

Telp. (0632) 21393, Faksimile (0632) 21393

Laman www.tobakab.go.id, Pos-el inspektorat@tobakab.go.id

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2026

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/250/IRDA/ST/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2026 untuk melaksanakan reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renja PD

- a. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu rancangan akhir Renja PD telah lengkap.

2. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

- a. Nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan nama program, kegiatan, pendanaan dan indikator pada RKPD Tahun 2026.

Catatan reviu:

—

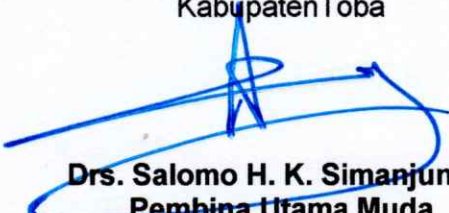
Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

--

Rekomendasi :

Mempertahankan keselarasan nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dengan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba


Drs. Salomo H. K. Simanjuntak
Pembina Utama Muda
NIP. 19680601 198903 1 004

Balige, 25 Agustus 2025

Plt. Inspektur
Kabupaten Toba


Bobby N. Batubara, SE, M.Si, Ak, CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19740405 200604 1 004